

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

HASAN MAWARDI

E011181306



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASAN MAWARDI

NIM : E011 18 1306

Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 15 Maret 2023

Yang Menyatakan



Hasan Mawardi



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : HASAN MAWARDI
NIM : E011 18 1306
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN
MA'RANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

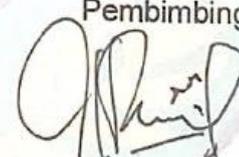
Makassar, 15 Maret 2023

Menyetujui

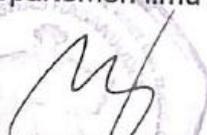
Pembimbing I

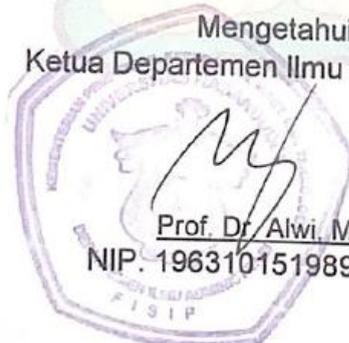

Drs. Lutfi Atmansyah, MA
NIP. 196211071988031002

Pembimbing II


Rizal Pauzi, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,


Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP. 196310151989031006





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : HASAN MAWARDI
NIM : E011 18 1306
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN
MA'RANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana,
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin.

Makassar, 15 Maret 2023

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Drs. Lutfi Atmansyah, MA

Sekretaris Sidang : Rizal Pauzi, S.Sos, M.Si

Anggota : 1. Dr. Muhammad Yunus, MA.

: 2. Dr. Badu Ahmad, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Hasan Mawardi (E011181306), Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. xii + 76 Halaman + 8 Gambar + 9 Tabel + 30 Pustaka + Lampiran, dibawah bimbingan Drs. Lutfi Atmansyah, MA dan Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si.

Di Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi sarana yang memberi dampak keringanan dan perlindungan sosial. Keluarga dalam kategori tidak mampu atau menengah kebawah dan keluarga rentan termasuk kedalam keluarga yang dapat menerima bantuan. Namun, ada persyaratan tertentu untuk terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan menggunakan teori Sutrisno (2007:125-126) yang menggunakan tiga indikator untuk mengukur efektivitas diantaranya adalah pemahaman program, tepat sasaran dan tepat waktu. Metodologi deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengambil data primer yaitu wawancara serta observasi langsung di lapangan. Sedangkan, untuk data sekunder diperoleh melalui organisasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bisa dikatakan Cukup efektif, dilihat dari masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang paham akan bantuan yang diterima baik dari segi alur pendistribusian dana dan kegiatan pendampingan penerima program. Meskipun mengenai sasaran program masih belum maksimal dan waktu pencairan bantuan sesekali mengalami keterlambatan.

Kata kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan.



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRACT

Hasan Mawardi (E011181306), The Effectiveness of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Ma'rang District, Pangkajene and Kepulauan Regency. xii + 76 Pages + 8 Pictures + 9 Tables + 30 Libraries + attachments, under the guidance of Drs. Lutfi Atmansyah, MA and Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si.

In Indonesia, the Family Hope Program (PKH) is a tool that provides relief and social protection. Families in the poor or lower-middle-class categories and vulnerable families are included in families that can receive assistance. However, there are certain requirements to be registered in the Integrated Social Welfare Data (DTKS).

This study aims to determine the implementation of the Family Hope Program in Ma'rang District, Pangkajene and Islands Districts using Sutrisno's theory (2007:125-126) which uses three indicators to measure effectiveness including program understanding, right on target, and timely. The qualitative descriptive methodology used in this study took primary data, namely interviews and direct field observations. Meanwhile, secondary data was obtained through the organization.

This research resulted in the conclusion that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Ma'rang District, Pangkajene and Islands Regencies can be said to be quite effective, in terms of the beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) assistance who understand the assistance received both in terms of the flow of distribution of funds and activities program beneficiary assistance. Even though the program targets and the timing of disbursement of aid occasionally experienced delays.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Family Hope Program.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi wa barakatuh

Syukur Alhamdulillah, kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmah, karunia dan ridho-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan". Skripsi ini dibuat sebagai syarat guna memperoleh gelas S.A.P pada Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Sholawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada panutan umat yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yang membawa umatnya dari jaman kebodohan kepada jaman pengetahuan (secara akal dan iman) yaitu Rasulullah sallallahu wa alaihi wasalam Muhammad, keluarga beserta sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya.

Proses penyelesaian skripsi ini melalui proses yang panjang dan dan dihadapkan pada berbagai kendala. Terdapat banyak kekurangan dan serta jauh dari kesempurnaan sebab terbatasnya ilmu, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Penulis menerima saran dan kritikan yang membangun dengan segala kerendahan hati untuk penyempurnaan karya ini kedepannya.

Banyak pihak yang mendukung dan menjadi penyemangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini dengan segala rasa syukur penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis **Zainal Fakhri** dan **Nurwana Kadir** yang sudah sangat banyak memberi dukungan dan bantuan baik secara moril juga doa yang terus dipanjatkan untuk penulis kepada Allah SWT. Terima

kasih atas pengorbanan di setiap tetes keringat, air mata dan kasih sayangnya yang senantiasa diberikan kepada penulis dari kecil sampai sekarang sehingga penulis dapat berada pada titik ini. Segala kasih dan sayang, saya ucapkan terima kasih untuk kakak dan adik penulis **Humaerah, Samnun dan Ahmad Naji Ghassan** yang sangat saya sayangi dan kasih yang senantiasa membantu selama perjalanan penulis dalam menyelesaikan studi. Dengan hati yang tulus dan penuh harap penulis mendoakan mereka agar senantiasa dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Pada karya ini, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Drs. Lutfi Atmansyah, MA sebagai dosen pembimbing satu dan Pak Rizal Pauzi, S.Sos.,M.Si sebagai dosen pembimbing dua yang telah meluangkan waktunya memberikan ilmu, masukan, arahan, juga motivasi yang memberi arti sejak awal penulis mengenyam pendidikan hingga persiapan serta terselesaikannya skripsi ini.

Penulis sadar akan penyusunan tugas akhir ini juga belum tentu berhasil apabila tidak ada bantuan, dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta wakil dekan, staf dan jajarannya.

3. Bapak **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Program studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, M.AP.** selaku sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Drs. Lutfi Atmansyah, M.A** sebagai dosen pembimbing I dan Bapak **Rizal Pauzi, S.Sos, M.Si** sebagai dosen pembimbing II dan sebagai dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan, masukan serta waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Muhammad Yunus, MA.** dan bapak **Dr. Badu Ahmad, M.Si** sebagai dosen penguji dalam ujian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. Para **Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.
8. Seluruh **staf Departemen Ilmu Administrasi** dan **staf di lingkup FISIP Unhas** tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
9. Terima kasih kepada Seluruh Pegawai **Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan** atas bantuan, informasi dan waktu yang diberikan serta telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Terima kasih kawan seperjuangan **LENTERA 2018** yang menjadi

keluarga baru selama menjalani kehidupan selama di kampus. Terima kasih atas momen-momen kebersamaannya, suka duka yang dilalui, canda tawa dan bantuan yang tak terhingga selama proses perkuliahan. Semoga harapan dan cita-cita kalian dapat tergapai dan tetap merawat serta menjaga hubungan kekeluargaan kita hingga nanti.

11. Terima Kasih Keluarga Besar **HUMANIS FISIP UNHAS** yang menjadi tempat belajar, berproses, dan berkembang selama berorganisasi penulis dengan kekeluargaan dan kebersamaan yang tak terlupakan selamanya.
12. Terima Kasih **Departemen Kaderisasi HUMANIS FISIP UNHAS** (Kak Rijal, Kak Zuhari, Kak Juni, Kak Moe, Kak Dillah, Amar, Ricky, Ninda, Mega, Ratu, Laeho, Jek, Resti, dan Vera) yang menjadi *partner* selama kepengurusan dan saling bertukar cerita selama penulis mengurus di Himpunan.
13. Terima Kasih **Sobat DPO Ceria** (Joel, Amar, Ler, dan Incess) yang menjadi kawan untuk berproses dalam berorganisasi, yang telah berjuang bersama melewati tantangan dan dinamika organisasi. Bersama tumbuh dan berproses mendewasakan diri.
14. **Ukm Seni Tari Fisip Unhas (Sodec)** yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman baru.
15. Teman-teman **KKN Gelombang 106 (Tamalanrea 1)** yang senantiasa membangun kerjasama dan keceriaan serta pengalaman yang tak terlupakan. Terima kasih telah bekerjasama memberikan dan menebarkan kebaikan pada sesama.
16. Teman Seperjuangan di Kabupaten Sumba Barat **Pejuang Muda Sumba Barat, NTT** (Caca, Molen, Fanni, Mirna, Windi, Dul, Azima, RR, dan Tsya) yang telah mengisi cerita penulis untuk merasakan suka, duka dan pengalaman yang sangat berharga. Pertemuan dengan saudara baru dari berbagai universitas. Terima kasih atas cerita tak terduga, keseruan, serta pengetahuan baru selama berada di perantauan. Sampai bertemu dengan cerita terbaik menurut takdir.
17. Keluarga **Senjapala Adventure** yang menjadi kawan untuk menikmati banyaknya ciptaan tuhan yang sangat indah dengan petualangan dan

moment-moment yang sangat berharga dengan hiburan sederhana namun berbekas.

18. Ana2ka di **RK** (Borju, Dien, Erwin, Azimi, Fendy, Hafiz, Amar, Indra, Ino, Iqra, Kappi, Aan, Abe, Andrian, Farhan, Rahmat, Reza, Ricky, Sandi, Sul, Syahrizal, Syahli, Amin, Firman, Jema) dengan berbagai cerita, tindakan, humor, serta perilaku yang tidak disangka-sangka, Terima kasih telah menemani Penulis dalam perjalanan Selama berkuliah.
19. Teman teman MSIB Batch 3 PT. Agritama Sinergi Inovasi, **Niagadesa** (Taufiq, Alyan, Ula, Lili, Nurul, Umi, Ira) yang telah menambah Cerita dipenghujung masa kuliah penulis, berbagi suka dan cerita menarik selama di Kabupaten Garut.
20. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan doanya. Semoga segala yang diupayakan demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapat balasan yang besar dari Allah SWT.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan tugas akhir ini sangatlah jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan para pembaca. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

Makassar, 22 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	11
I.3 Tujuan Penelitian	11
I.4 Manfaat Penelitian	11
I.5 Batasan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
II.1 Konsep Efektivitas	13
II.1.1 Pengertian Efektivitas	13
II.1.2 Efektivitas (Ukuran).....	14
II.2 Konsep Program.....	20
II.3 Konsep Kemiskinan	22
II.3.1 Pengertian Kemiskinan	22
II.3.2 Jenis-Jenis Kemiskinan	24
II.3.3 Strategi Penanggulangan Kemiskinan	25
II.4 Konsep Program Keluarga Harapan (PKH).....	27
II.4.1 Pengeritan Program Keluarga Harapan (PKH).....	27
II.4.2 Dasar Hukum.....	27
II.4.3 Tujuan Program Keluarga Harapan	28
II.4.4 Kriteria Penerima Manfaat PKH	28
II.4.5 Besaran Manfaat dan Jangka Waktu Kepesertaan PKH	29
II.4.6 Hak keluarga Penerima Manfaat PKH.....	30
II.5 Konsep kesejahteraan Masyarakat	31
II.5.1 Konsep kesejahteraan Masyarakat	31

II.5.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat	32
II.6 Kerangka Pikir	36
BAB III METODE.....	39
III.1 Pendekatan Penelitian	39
III.2 Lokasi Penelitian.....	39
III.3 Fokus Penelitian	39
III.4 Unit Analisis	40
III.5 Sumber Data.....	40
III.6 Narasumber atau Informan	41
III.7 Teknik Pengumpulan Data.....	41
III.8 Teknik Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	44
IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	44
IV.1.1 Geografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	44
IV.1.2 Visi dan Misi kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	46
IV.2 Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	46
IV.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	47
IV.2.2 Struktur Organisasi.....	50
IV.3 Gambaran Umum Kecamatan Ma'rang	51
IV.3.1 kependudukan Kecamatan Ma'rang	52
IV.3.2 Struktur Organisasi.....	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
V.1 Pemahaman Program	57
V.2 Tepat Sasaran.....	62
V.3 Tepat Waktu.....	69
BAB VI PENUTUP	74
VI.1 Kesimpulan	74
VI.2 Saran.....	75
Daftar Pustaka	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Persentasi Jumlah Masyarakat Miskin di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2018, 2019 dan 2020	8
Gambar II. 1 Kerangka Pikir.....	38
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pangkajenen dan Kepulauan	51
Gambar IV. 2 Peta Wilayah Kecamatan Ma'rang.....	52
Gambar IV. 3 Struktur Organisasi Kecamatan Ma'rang.....	55
Gambar V. 1 Mekanisme Calon Penerima Manfaat PKH.....	57
Gambar V.2 Grafik Kondisi Masyarakat Penerima Bantuan PKH Kecamatan Ma'rang	66
Gambar V. 2 Jadwal Penyaluran Bantuan Sosial PKH.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	6
Tabel I.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Pada Tahun 2020	7
Tabel I.3 Data Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	9
Tabel II.1 Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN	34
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010-2020	45
Tabel IV. 2 Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Ma'rang	53
Tabel V. 1 Model Pendampingan Program Bantuan PKH Kecamatan Ma'rang ..	59
Tabel V. 2 Hasil Penelitian	61
Tabel V. 3 Hasil Penelitian	67
Tabel V. 4 Daftar Jadwal Penyaluran bantuan PKH Kecamatan Ma'rang	70
Tabel V. 5 Hasil Penelitian	72

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menjadi isu yang meluas, kemiskinan telah berubah menjadi ancaman dan malapetaka bagi suatu bangsa. Salah satu masalah terbesar sebagian besar negara di dunia adalah kemiskinan. Meski tidak secara eksplisit disebutkan, sebagian negara belum bisaterlepas dari masalah kemiskinan, mengingat berbagai derajat dan populasi orang miskin di setiap negara. Salah satu negara yang mengalami permasalahan tersebut yakni Indonesia. Menurut informasi Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 26,50 juta orang miskin di Indonesia per September 2020, angka ini turun dari 1.04jt (Maret, 2021) dan 1.05jt (September, 2021).

Salah satu negara yang mengutamakan kesejahteraan warganya adalah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan kesejahteraan dimana kesejahteraan merupakan tujuan khusus dalam Bab XIV, khususnya dalam pasal 33 dan 34, yang mengatur tentang sistem ekonomi dan pasar serta kepedulian negara terhadap kelompok rentan (seperti anak-anak yang kurang mampu juga yang dilantakan). UUD Negara RI tahun 1945 lebih lanjut mengatur, yaitu bantuan umum diberikan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar, dan bahwa kesejahteraan rakyat didahulukan di atas kesejahteraan individu.

Menurut UUD tahun 1945 dalam pembukaan, negara bertugas melantaskan masyarakat yang sejahtera, mencerdaskan masyarakat, serta ikut dalam pelaksanaan tatanan global dengan berlandaskan masyarakat yang merdeka, damai serta adil. Hak untuk memperoleh pangan, papan dan sandang dengan cukup juga dijamin oleh UU No. 13 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan masyarakat miskin dan fakir. Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk

memerangi kemiskinan untuk mewujudkannya. Hal ini terlihat dari undang-undang dan program yang berbicara tentang peningkatan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memberikan bantuan untuk kegiatan yang ditujukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 mengenai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Melalui terbitnya PP RI No 15 Tahun 2010 mengenai percepatan pengentasan kemiskinan, goalsnya adalah 8% hingga 10% pada akhir tahun 2014 kemiskinan menurun, pemerintah mendukung program-program pengentasan kemiskinan.

Masyarakat yang sejahtera tercermin melalui taraf hidupnya. Kesejahteraan adalah keadaan yang menandakan suatu masyarakat telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik materi maupun sosial. Kesejahteraan sering dikaitkan dengan kemiskinan, tetapi tidak selalu. Kemiskinan berkurang dengan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Semakin banyak orang yang kurang sejahtera seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan.

Tujuan utama Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diantaranya adalah, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, menutup kesenjangan regional, meningkatkan kualitas manusia, meningkatkan kualitas lingkungan, mengelola sumber daya alam, dan meningkatkan infrastruktur— adalah untuk meningkatkan situasi kesejahteraan rakyat. Prioritas utama pembangunan nasional adalah; pemeliharaan kesejahteraan rakyat; struktur kelembagaan; dan terlaksananya perlindungan sosial yang tersistem.

Terselenggaranya kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan merupakan gejala dari permasalahan yang dialami masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Jika pendapatan individu

belum mencukupi kebutuhan yang mereka anggap dasar (pangan, sandang, papan) maka termasuk miskin. Bagaimana orang merasakan kebutuhan serta beradaptasi dengan lingkungan, dapat mempengaruhi dan menentukan pendapatan yang mana minimalnya untuk diri sendiri.

Kesejahteraan dianggap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Strategi ini telah berhasil di banyak negara. Pertumbuhan modal dan pendapatan perkapita merupakan tanda-tanda pembangunan ekonomi yang efektif. Ketika kebutuhan mendasar untuk pendapatan, makanan, pendidikan, papan, kesehatan, juga perlindungan yang mengancam kehidupan, maka terciptalah kondisi yang sejahtera. Ini karena kehidupan manusia aman dan menyenangkan.

Tim Nasional percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2011 telah menyusun empat teknik mendasar untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan yaitu:

- a. Penyempurnaan program perlindungan sosial;
- b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar;
- c. Pemberdayaan masyarakat, dan;
- d. Pembangunan yang menyeluruh.

Melalui teknik tersebut, TNP2K (2011) menciptakan empat kelompok alat pengentasan kemiskinan yang berbeda :

- a. Klaster I, basis keluarga terpadu melalui program bantuan sosial
- b. Klaster II, basis pemberdayaan masyarakat untuk program pengentasan kemiskinan; dan
- c. Klaster III, basis pemberdayaan usaha Mikro Menengah dan kecil.

Strategi bantuan sosial berbasis Data Terpadu Kesejahteraan social

sedang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (DTKS) saat ini mengacu pada UU 13 Tahun 2011 mengenai Perlakuan kaum miskin dan fakir, yang menyebutkan dalam pasal 11 ayat yaitu data yang sudah ditetapkan menjadi landasan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial telah digunakan oleh program-program bantuan sosial diantaranya Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 memperkenalkan program keluarga harapan dalam mempercepat pengentasan fakir dan miskin dan menciptakan program jaminan sosial. Strategi yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCTs) telah dilaksanakan di sejumlah negara dengan hasil yang baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan di sana. Tujuan dari program ini adalah memotong rantai kemiskinan yang selama ini berkembang di Indonesia dengan menciptakan sistem jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu guna mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

APBN memberikan bantuan kepada peserta PKH, dan APBD yang mendukung diperlukan sebagai upaya kelarasan penyelenggaraan PKH & pelaksanaannya di Kabupaten Kota. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat mungkin untuk dilaksanakan dalam membantu RTSM memutus mata rantai kemiskinan. Keikutsertaan dalam Program Keluarga Harapan bukan hanya sebagai pemberi manfaat, lebih dari itu, berkontribusi pada kehidupan berkaitan dengan peningkatan kesehatan dan pendidikan juga secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di wilayah penerima PKH tertentu. Dengan PKH, diharapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan

memiliki akses yang besar terhadap pelayanan sosial mendasar, termasuk pangan, gizi, pendidikan, dan perawatan kesehatan, serta penghapusan kesenjangan sosial ekonomi, ketidakberdayaan, dan keterasingan sosial yang telah lama terjadi telah hadir di kalangan orang miskin.

Peserta PKH ini diwajibkan untuk memenuhi sejumlah tugas di bidang kesehatan dan pendidikan. Misalnya, mereka diwajibkan melakukan memeriksakan kehamilan pada bidan, pemeriksaan kesehatan, melakukan upaya pencegahan stunting seperti memberi gizi yang cukup hingga mengimunisasi. Anggota keluarga PKH juga wajib didaftarkan untuk ke akses pendidikan. Kehadiran mereka di lingkungan pendidikan idealnya sesuai dengan usia atau tahapan anak didalam pendidikan. Berikutnya adalah unsur unsur yang dianggap sebagai kesejahteraan sosial, yang mencakup difabel dalam kategori berat dan orang yang mulai renta dimulai pada usia 60 tahun. Masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH biasanya mendapatkan bantuan maksimal enam tahun. Pada tahun 2020, akan ada 10 juta kelompok penerima manfaat PKH, dimana anggarannya mencapai Rp.36,9T.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa anggota keluarga penerima PKH memiliki hak berupa dukungan finansial dan lainnya serta kewajiban yang dilihat dari dua sudut, yaitu kewajiban di bidang kesehatan dan pendidikan. Keluarga penerima bantuan PKH akan mendapatkan konsekuensi berupa pengurangan tunjangan jika tidak memenuhi kebutuhannya. Efektivitas pendamping PKH juga turut andil dalam keberhasilan pengerahan PKH. Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai Pendamping PKH dengan ketetapan Direktorat jendral perlindungan dan Kemensos RI setelah memenuhi kualifikasi dan diseleksi dengan surat keputusan mengangkat warga negara Indonesia

sebagai Pendamping PKH untuk memberi manfaat pada keluarga PKH berdasarkan kontrak kerja selama jangka waktu tertentu (Kemensos RI, 2015: 10).

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salahsatu dari banyak daerah penerima manfaat program. Luas Pangkajene, ibukota kabupaten, semula diperkirakan 1.112,29 km², namun setelah dianalisis dengan Bakosultanal, bertambah menjadi 12.362,73 km², dimana 898,29 km² daratan dan 11.464,44 km² perairan.

Tabel I. 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

IPM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		
	2018	2019	2020
A. INDEKS KESEHATAN	70.95%	71.52%	71.78%
Angka Harapan Hidup (AHH)	66.12%	66.49%	66.66%
B. INDEKS PENDIDIKAN	59.44%	60.08%	60.98%
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.41%	12.51%	12.76%
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7.49%	7.60%	7.66%
C. INDEKS PENGELUARAN	73.59%	74.12%	74.15%
Paritas Daya Beli (Pengeluaran)	11197.00	11392.00	11405.00
IPM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	67.71%	68.29%	68.72%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2022

Berdasarkan tabel di atas 67,71% tahun 2018, indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan sebesar 68,29% pada tahun 2019 dan 68,72% pada tahun 2020. Data administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

memiliki tigabelas Kecamatan dimana 103 desa dengan 9 kecamatan di daratan serta 4 Kecamatan di Nusantara.

Tabel I. 2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pada Tahun 2020.

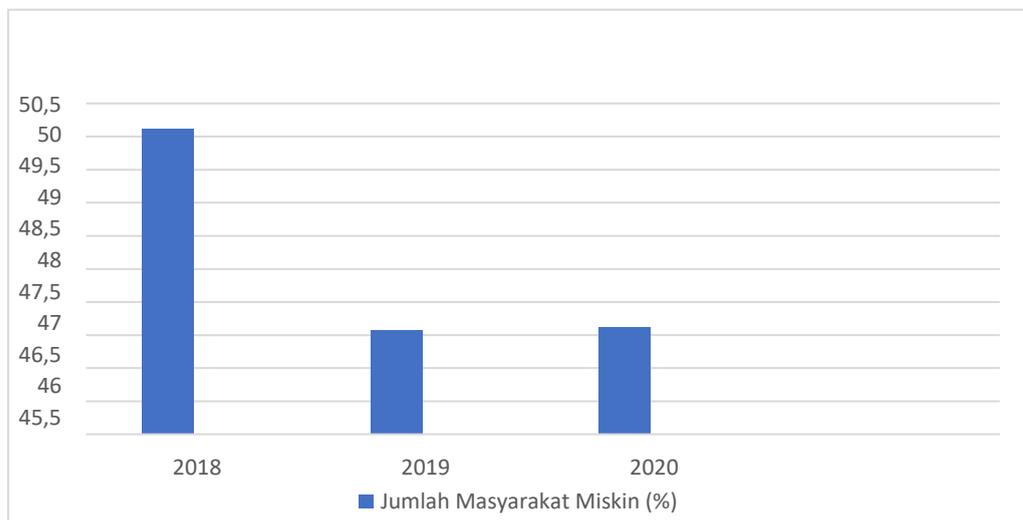
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Pada Tahun 2020		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	Liukang Tangaya	9456	9893	19349
2	Liukang Kalmas	7294	7324	14618
3	Liukang Tupabbiring	8900	8828	17728
4	Liukang Tupabbiring Utara	6793	6772	13565
5	Pangkajene	23864	24792	48656
6	Minasatene	19068	19872	38940
7	Balocci	8112	8448	16560
8	Tondong Tallasa	4931	5168	10099
9	Bungoro	21582	22297	43879
10	Labakkang	24932	26684	51616
11	Ma'rang	16763	17638	34759
12	Segeri	10970	11369	22339
13	Mandalle	6789	7236	14025

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2022

Beberapa tahun terakhir (2018) menunjukkan sekitar 50,12% masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kedalam kategori miskin kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan angka masyarakat yang tergolong tidak mampu sehingga berada pada angka 47,07% dan pada tahun 2020 berada pada

angka 47,12%.

Gambar I. 1
Persentasi Jumlah Masyarakat Miskin di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2018, 2019 dan 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2022

Kecamatan Ma'rang merupakan bagian dari Kabupaten Pangkajene dan kepulauan yang mencakup sepuluh Desa/Kelurahan dan salah satu Kecamatan yang masyarakatnya menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebanyak 1745 Keluarga pada tahun 2022. Adapun lebih jelasnya terkait keluarga penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ma'rang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I. 3

**Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 2022
Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Data Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		
No	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Bantuan Sosial
		PKH
1	Alesipitto	120
2	Attang Salo	271
3	Bonto-Bonto	96
4	Ma'rang	251
5	Padang Lampe	183
6	Pitue	159
7	Pitusunggu	129
8	Punranga	128
9	Talaka	174
10	Tamangapa	234
Jumlah		1745

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2022

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bukan hanya berupa bantuan uang yang bersyarat; selain itu, penerima manfaat PKH mendapatkan manfaat sebagai berikut:

a. Pendampingan

Bantuan Lembaga Pembayar, seperti mengelola bantuan, diblokir, dan kartu debit hilang atau diblokir. Ada pula bantuan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

b. Pertemuan untuk Membangun Kapasitas Keluarga (P2K2)

P2K2 digunakan sebagai wadah oleh Pendamping PKH untuk memberikan materi yang ditetapkan oleh Kemensos melalui lima modul dalam upaya mewujudkan tujuan PKH yaitu menmandirikan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik KPM di Bidang Pendidikan, gizi dan kesehatan, hak perlindungan sosial dan kesejahteraan anak, dan modul ekonomi. Lansia dengan usia 65 tahun dan penyandang disabilitas berat.

c. Pengetahuan Stunting

Adanya pengetahuan tentang kegiatan stunting di masyarakat, khususnya di kalangan peserta PKH, sehingga dapat mencegah stunting sejak dalam kandungan.

Menurut temuan penelitian Prichatin (2019) program ini sudah berjalan efektif, dan sudah mengalami banyak perubahan. Penerima manfaat PKH merasakan indikator tertentu, namun tidak semuanya. Kemudian sesuai dengan temuan penelitian Yuliani (2020) efektivitas penanganan PKH diukur dengan efektivitas seperti *achievement*, kombinasi, juga penyesuaian. Langkah-langkah adaptasi sudah terbukti efektif. Sementara indikator lainnya belum efektif. Hal ini dikarenakan target penerimaan peserta PKH tidak terpenuhi, dan proses pengelolaan bantuan kepada penerima PKH juga tidak efektif, selain itu, kemampuan untuk komunikasi program juga belum efektif. Pada metrik pencapaian dikatakan belum terpenuhi karena target penerimaan peserta PKH belum terpenuhi, dan proses pengelolaan bantuan kepada penerima PKH belum juga optimal. Pada metrik integrasi dikatakan tidak efektif karena tidak ada penyampaian keterampilan bagi penerima bansos PKH dalam sosialisasi dengan pendamping PKH. Hasilnya, peneliti menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan masih belum efektif dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan

program karena berbagai kendala dan kondisi lapangan.

Pemerintah berharap program ini dapat digunakan masyarakat untuk memutus garis kemiskinan atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), serta mengubah gaya hidup dan perilaku yang berhubungan dengan *scale up* pada bidang pendidikan juga kesehatan. Program ini bukan hanya dievaluasi akan tetapi perlu diketahui bagaimana dampak terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang menerima PKH yang dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada masyarakat Kecamatan Ma'rang Pangkajene dan Kepulauan. Oleh karena itu melalui paparan diatas, penulis akan mengangkat penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”**.

I.2 Rumusan Masalah

Melalui hal tersebut, diangkatlah perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Ma'rang, Pangkajene, dan Kepulauan?”

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kabupaten Ma'rang, Pangkajene, dan Kepulauan.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun, manfaat dari penelitian ini adalah;

a. Manfaat Akademik

Penulis berharap penelitian ini dapat sumber pengetahuan & referensi untuk civitas akademika khususnya Ilmu Administrasi Publik dalam kajian Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

b. Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini dapat memberi masukan untuk berbagai pihak khususnya kepada penanggungjawab Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sehingga bisa menjadi acuan untuk peningkatan mutu pelaksanaan sesuai tujuan program.

I.5 Batasan Penelitian

Teori Sutrisno (2007:125-126) tentang mengukur Efektivitas Program terdiri dari lima Indikator yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Akan tetapi pada penelitian ini hanya dibatasi tiga Indikator yakni Pemahaman Program, Tepat Sasaran dan Tepat Waktu dikarenakan hanya mengukur efektivitas Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Efektivitas

II.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata Efektif yang berarti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diperhatikan dari beberapa sudut pandang dan erat kaitannya dengan efisiensi. Efektivitas menurut Barnard dalam Ma'mun (2019:34) *"accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not."* Menurut pandangan ini, tindakan dapat disebut efektif jika tujuan yang ditetapkan tercapai.

Menurut Gie dalam Firdaus (2016:7), efektivitas terjadi sebagai akibat atau efek yang diinginkan dalam suatu tindakan dan untuk setiap program yang efisien, dimana dapat dilihat hasil yang diinginkan, tujuan, atau konsekuensi dengan program tersebut. kegiatan yang telah dicapai semaksimal mungkin. Dunn (2003: 429) mengemukakan konsep efektivitas, yang menyatakan bahwa efektivitas selalu diukur dengan satuan produksi atau jasa atau nilai moneter, terlepas dari hasil dari tujuan tersebut tercapai/tidak.

Kemudian, Tjokromidjojo dalam Pasolong (2010), menyatakan bahwa efektivitas berarti pelaksanaan administrasi mencapai hasil tertentu dengan optimal. Emerson menyatakan dalam (Iqbal, 2018) yaitu: *"Effectiveness is a measuring in tern of attaining prescribed goal or objectives (efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya)"*. Hal ini adalah komponen penting dalam memperoleh tujuan tertentu yang menjadi target dimana hal tersebut telah ditetapkan pada suatu komunitas/organisasi. Jika tujuan atau sasaran yang diinginkan tercapai, itu

dianggap efektif. Dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan dan hasil program, adalah mungkin untuk mengukur tingkat keefektifannya.

Efektivitas diartikan sebagai kesesuaian antara orang yang melakukan kegiatan melalui target yang dituju, serta seberapa berhasil suatu organisasi memperoleh dan mengoptimalkan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan operasional tulis Salim (Dini, 2019). Hadayaningrat dalam (Lestari & Murti, 2015) berpendapat, pencapaian tujuan yang dimaksud adalah ukuran efektivitas.

Penjelasan di atas menyimpulkan, alat untuk mengukur tingkat keberhasilan yang sudah tercapai dan dikatakan berhasil jika semua komponen yang mewakili tujuan atau program organisasi telah tercapai. Efektifnya suatu kegiatan bukan karena tidak tercapainya target dan membuahkan hasil yang sesuai dengan tujuan program.

II.1.2 Efektivitas (Ukuran)

Untuk mengukur efektivitas merupakan hal yang cukup sulit karena tergantung siapa yang menilai dan dari mana seseorang mem-pelajari serta membuat tafsir akan hal tersebut. Tingkat kemandirian dapat dinilai dengan membandingkan hasil yang diinginkan dengan hasil aktual yang diperoleh. Menurut Siagian (2008), karakteristik berikut perihal mencapai target dikatakan efektif atau tidak efektif:

1. Tujuan yang ingin dicapai dengan jelas; ini artinya agar pegawai dapat mencapai tujuan (terarah) selama menjalankan tugasnya.
2. Mencapai strategi dengan tujuan yang jelas; Sebagaimana dipahami, sebuah rancangan merupakan “on the road” untuk dapat berhasil pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, hal ini dimaksudkan supaya

pelaksana dapat mencapai tujuan kelompok.

3. Alur analisa & pengembangan ketentuan baik terkait dengan *goals* yang ditentukan serta rancangan yang disepakati, dalam artian peraturan ini harus bisa untuk menjadi jembatan sebagai upaya dalam keberlangsungan operasional
4. Perumusan yang hati-hati memerlukan keputusan sekarang apa yang akan dilakukan organisasi dikemudian hari
5. Program yang tersusun, rancangan yang dianggap baik tetap perlu untuk diterjemahkan kedalam rencana pelaksanaan atau pelaksana dapat merasa kurang memiliki pedoman dalam bekerja ataupun bertindak.
6. Tersedianya infrastruktur. Dengan sarana & infrastruktur yang tersedia, yang kemungkinan besar akan tersedia di kelompok
7. Implementasi yang efektif dan efisien, karena implementasi semakin mendekati suatu organisasi dengan tujuannya, sebaik apapun suatu program, jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuannya.

Selanjutnya, Steers berpendapat dalam Waluyo (2007) bahwa organisasi yang efisien adalah organisasi yang berhasil memodifikasi teknologi, proses kerja, lingkungan kerja, dan kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan secara efisien. Steers mengusulkan beberapa kriteria untuk menilai atau mengukur efektivitas, antara lain:

- a. Fleksibilitas.
- b. Produktivitas dalam organisasi.
- c. Kemampuan untuk bekerja.
- d. Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan.

- e. Menemukan dan memanfaatkan sumber daya manusia.

Untuk menentukan apakah suatu program dalam suatu organisasi efektif atau tidak dalam hal pencapaian tujuan, Gibson et al. (1994) mengusulkan indikator atau kriteria berikut untuk mencapai tujuan dan sasaran:

- a. Kejelasan pencapaian program (tujuan)
- b. Kejelasan dalam strategi
- c. Analisa dan perumusan kebijakan
- d. Perencanaan menyeluruh.
- e. Pemrograman sesuai.
- f. Akses sarana & prasarana.
- g. Implementasi yang efisien dan efektif
- h. Sistem pengendalian serta pengawasan pendidikan.

Budiani (2007) mengklaim, variabel-variabel berikut dapat digunakan untuk menilai efektivitas program:

- a. Akurasi target program: tingkat pemahaman peserta mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan
- b. Sosialisasi: memberikan pencerahan kepada masyarakat umum dan peserta program yang dituju, khususnya dalam hal bagaimana pelaksanaan program, penyelenggara program harus mampu melakukan sosialisasi program.
- D. Pemantauan: kegiatan yang diambil untuk menjaga peserta program setelah diberlakukan.

Selanjutnya dalam Waluyo (2007), Robbins memaparkan beberapa pendekatan efektivitas, antara lain:

- a. Pendekatan pencapaian tujuan, yang menyatakan bahwa suatu Jika sebuah organisasi memenuhi kebutuhan konstituen internalnya—

khususnya, mereka yang mendukung keberlangsungan keberadaan organisasi—maka dikatakan efektif;

- b. Pendekatan konstituen strategis, yang mengisyaratkan bahwa, jika memenuhi tuntutan konstituen yang ada di dalam organisasi, yaitu konstituen yang mendukung kelangsungan eksistensi organisasi. Pandangan ini menganggap organisasi adalah suatu kesatuan yang dibentuk secara disengaja dan realistis untuk mencapai tujuan. Akibatnya, tujuan yang mau dicapai adalah ukuran yang tepat dari efektivitas.

Menurut Sutrisno (2007:125-126), pengukuran efektivitas program dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemahaman Program, yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisis dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.
- b. Tepat Sasaran, yaitu bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
- c. Tepat waktu, yaitu untuk penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif.
- d. Tercapainya Tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum.
- e. Perubahan Nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat

diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak perubahan nyata bagi masyarakat.

II.1.2 Model Proses Efektivitas

Bentuk proses keefektifan ini berfokus pada proses utama yang terkait dengan keefektifan daripada keefektifan sebagai hasil akhir. Akibatnya, bentuk ini menjelaskan organisasi dan lingkungan dinamis. Menurut Steers (1985), model efektivitas proses memiliki 3 dimensi, yaitu sebagai berikut:

a. Optimalisasi Tujuan

Dengan membandingkan hasil dengan tujuan organisasi, penting untuk menilai kepentingan relatif dari keberhasilan atau kegagalan organisasi tertentu. Pengoptimalan tujuan percaya bahwa beberapa kelompok kesulitan untuk "mengoptimalkan" *goals* apapun, meskipun diinginkan. Manajer yang efektif, di sisi lain, mempertimbangkan untuk menentukan dan mengejar tujuan yang optimal sambil mengakui bahwa ada faktor pembatas pada perilaku dan kinerja organisasi (yaitu tujuan yang diinginkan yang telah dibatasi atau diubah oleh sumber daya yang tersedia). Dengan demikian, optimalisasi adalah metode menyeimbangkan tujuan bersaing untuk memastikan bahwa masing-masing menerima perhatian dan sumber daya yang memadai sebanding dengan kepentingannya bagi organisasi. Dikatakan di sini bahwa alih-alih konsep tujuan maksimum, efektivitas harus diukur terhadap tujuan yang dapat dicapai.

b. Perspektif Sistem

Penerapan pendekatan menekankan pentingnya makna interaksi antara organisasi lingkungan. Keberhasilan atau kegagalan organisasi diperiksa

dari sudut pandang sistem, yang berfokus pada interaksi antara komponen internal dan eksternal. Manajer akan lebih siap untuk mengambil tindakan tegas untuk mendukung pencapaian tujuan jika hubungan ini dipahami, yang akan meningkatkan pemahaman mereka tentang dinamika organisasi.

c. Tekanan pada perilaku

Penekanan pada pemahaman bagaimana perilaku manusia berhubungan dengan keberhasilan organisasi merupakan faktor terakhir. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa anggota organisasi akan berusaha keras untuk mencapai tujuan pemimpin mereka jika mereka berbagi tujuan tersebut. Di sisi lain, kecil kemungkinan orang akan mengoptimalkan kontribusi mereka jika tujuan organisasi tidak sejalan dengan kebutuhan dan ambisi mereka. Akibatnya, ketika menangani keberhasilan organisasi, kita juga harus memperhitungkan bagaimana keinginan karyawan dan keinginan organisasi terkait.

II.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Empat faktor yang berhubungan dengan efikasi ditemukan oleh Steers (1985), yaitu:

a. Karakteristik Organisasi

Aspek efektivitas tertentu dapat dipengaruhi oleh struktur organisasi dan teknologi. Ditemukan bahwa struktur meningkatkan fungsi khusus, formalisasi dan sentralisasi proses pengambilan keputusan. Meskipun beberapa karakteristik struktural berkorelasi positif dengan produktivitas dan efisiensi, sikap kerja (terutama kepuasan kerja) dan keterlibatannya berhubungan negatif dengan produktivitas dan efisiensi. Ini menyiratkan

bahwa manajer harus secara jelas mendefinisikan tujuan akhir.

b. Karakteristik Lingkungan

Efektivitas dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal terdiri dari kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang harus dioperasikan organisasi untuk memperoleh dan mentransfer sumber daya. Lingkungan internal diantaranya faktor budaya dan sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku pekerja.

c. Karakteristik Pekerja

Para pekerja itu sendiri merupakan variabel ketiga yang mempengaruhi efektivitas. Anggota organisasi sebenarnya memiliki pengaruh terbesar terhadap efektivitas karena cara mereka bertindak, yang memiliki dampak jangka panjang terhadap tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Sangat penting bagi manajer untuk menyadari perbedaan sikap pribadi di antara karyawan untuk menanggapi upaya pencapaian tujuan dengan cara yang berbeda.

d. Kebijakan dan Praktik Manajemen

Manajer dapat meningkatkan efektivitas organisasi dengan memanfaatkan sejumlah strategi yang berbeda. Contoh dari mekanisme ini termasuk menetapkan tujuan strategis, menemukan dan menggunakan sumber daya secara efektif, mengembangkan pengaturan yang mendorong pencapaian, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, adaptasi organisasi, dan inovasi.

II.2 Konsep Program

Program merupakan komponen penting dalam mengembangkan suatu kebijakan atau kegiatan. Semua jenis rencana akan lebih mudah diimplementasikan dengan program. Dimaknai sebagai suatu rancangan

mengenai prinsip dan upaya yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Program-program yang dapat diakses menurut Terry dalam Mulyadi (2015) adalah sebagai berikut:

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required action and time schedules for each in order to achieve stated objectives. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets”. (Program merupakan rencana yang bersifat 20 komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran).

Menurut Kayamoto dalam Ramlawati Djabbar (2013), program adalah rangkaian kegiatan dengan permulaan yang harus dilakukan dan diselesaikan untuk mencapai suatu tujuan.

Charles mengklaim bahwa program adalah strategi yang digunakan untuk menghasilkan hasil dalam Anas (2017). Ciri-ciri yang tercantum di bawah ini dapat membantu dalam identifikasi, khususnya:

- a. Program memerlukan staf, misalnya pelaksana atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran sendiri; namun, program terkadang dapat diidentifikasi melalui anggaran.
- c. Program tersebut memiliki identitas tersendiri, yang dapat dikenali oleh masyarakat umum jika berjalan dengan baik.

Menurut S.P. Siagian dalam Mulyadi (2015), rincian suatu rencana merupakan rumusan suatu program kerja. Program kerja tersebut mengambil berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Akibatnya, program harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sasaran yang diinginkan,
- b. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu

- c. Jumlah biaya yang diperlukan dan jumlahnya, d. jenis kegiatan yang dilakukan,
- d. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik dari segi kuantitas maupun kualifikasi, keahlian, dan keterampilan.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam Pratama & Fauzi (2018), program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tujuan yang terdefinisi dengan baik.
- b. Memilih peralatan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Kerangka kerja kebijakan terpadu atau proyek yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan program seefisien mungkin.
- d. Evaluasi berdasarkan estimasi biaya dan manfaat yang dihasilkan oleh program.
- e. Hubungan dalam kegiatan lain yang terkait dengan upaya dan program pembangunan.
- f. Berbagai upaya pengelolaan, seperti penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk menjalankan program.

Berdasarkan berbagai definisi program yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa program merupakan metode yang matang untuk mencapai tujuan organisasi.

II.3 Konsep Kemiskinan

II.3.1 Pengertian Kemiskinan

Suatu kelompok yang lemah atau tidak berdaya secara kelas, gender, atau etnis digolongkan lemah secara struktural. Mereka yang berasal dari strata sosial ekonomi rendah, kelompok etnis minoritas, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas hanyalah segelintir kelompok yang tidak berdaya menghadapi diskriminasi. Terlepas dari kenyataan bahwa prasangka di beberapa

daerah sering membuat mereka tidak berdaya, mereka sering diremehkan dan bahkan dicirikan sebagai pemalas dan lemah.

Sennet, Cabb, dan Conway dalam (Aris, 2008) berpendapat bahwa sejumlah faktor termasuk kurangnya keamanan finansial, keahlian, akses informasi, dukungan finansial, pendidikan, pelatihan, dan dukungan fisik dan emosional, berkontribusi pada ketidakberdayaan. Alhasil, kemiskinan menjadi elemen kunci yang mendorong ketidakberdayaan karena bisa dianggap sebagai kelemahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Lebih lanjut, Kuncoro (2000) menggarisbawahi definisi kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang. Ketidakmampuan struktur sosial untuk mengalokasikan sumber daya dan uang secara adil di antara anggota masyarakat disebut sebagai kemiskinan. Sulistiyani (2017) Kemiskinan adalah bilaman masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas.

Sementara itu, Shirazi dan Pramanik mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana individu kekurangan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang dalam kehidupan—materi, interpersonal, psikologis, dan spiritual. Fokus utama definisi ini adalah ketidakmungkinan. Sebaliknya, Shirazi dan Pramanik mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dimana orang berjuang untuk hidup nyaman dalam keadaan sosial, psikologis, spiritual, dan ekonomi mereka.

Kemiskinan terjadi ketika sebuah keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan dalam hal pengeluaran. Karena objek

kemiskinan manusia adalah makhluk sosial, maka penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Menurut ukuran BPS, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) membentuk Garis Kemiskinan (GK), menjadikan GK sama dengan $GKM + GKNM$. Perhitungan garis kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan berbeda.

Rasio Kebutuhan Fisik Minimum menurut Zulkifli Husin (1997) merupakan standar yang dapat digunakan untuk mengukur kekeruhan penduduk (RFKM). Tentukan harga yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar empat orang sehat dan 5 orang ideal, dengan asumsi bahwa kebutuhan fisik minimum terpenuhi.

II.3.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Berdasarkan karakteristiknya, orang miskin biasanya tidak memiliki keterampilan bisnis yang memadai dan sedikit akses ke peluang ekonomi, yang membuat mereka jauh tertinggal dari orang lain yang memiliki potensi lebih besar. Dua macam tingkat kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, tetap menjadi krusial, menurut Soemardjan dalam Sumodigrat (1999:81). Beberapa teknik penilaian kemiskinan dengan berbagai standar telah dibahas. Penghasilan yang tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan termasuk makanan, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan disebut sebagai kemiskinan absolut. Jenis kemiskinan yang kedua adalah kemiskinan relatif, yang ditentukan oleh proporsi distribusi pendapatan di suatu daerah.

Moeljarto (1995: 98) membahas tentang Profil Kemiskinan menjadi enam alasan, antara lain:

- a. Keadaan miskin merupakan hal yang rentan;

- b. Kemiskinan berarti terbatasnya akses terhadap berbagai kesempatan kerja karena hubungan produksi masyarakat tidak memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi;
- c. Persoalan ketidakpercayaan, perasaan tidak berdaya, emosional dan sosial dalam menghadapi elite desa dan birokrat yang mengambil keputusan tentang dirinya sendiri tanpa memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya, sehingga membuat
- d. Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar pendapatan seseorang untuk makanan dengan kualitas dan kuantitas yang terbatas;
- e. Rasio ketergantungan yang tinggi karena jumlah keluarga yang besar; dan
- f. Kemiskinan biasanya diwariskan.

II.3.3 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah bekerja secara metodelis, terorganisir, dan terkoordinasi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk meminimalkan jumlah orang miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan meliputi bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha besar dan kecil, dan inisiatif lain yang ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Mereka dilakukan oleh pemerintah federal, pemerintah daerah, komunitas bisnis, dan masyarakat umum.

Pemerintah saat ini memiliki sejumlah inisiatif terpadu untuk mengurangi kemiskinan, mulai dari yang berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan usaha kecil dan semuanya diawasi oleh berbagai komponen nasional dan daerah. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, yang berupaya menurunkan angka kemiskinan menjadi 8% hingga 10% pada akhir tahun 2014. Hal itu dilakukan untuk mendorong efektivitas langkah-langkah

penanggulangan kemiskinan.

Empat teknik mendasar telah diidentifikasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan: penyelesaian program perlindungan sosial, layanan untuk akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan inklusif. Pokja Kebijakan Bantuan Sosial (Pokja), Pokja Kebijakan Jaminan Kesehatan, Pokja Peningkatan Kapasitas Ekonomi, dan Pokja Kebijakan Pendapatan adalah bagian dari strategi keseluruhan pemerintah. Keamanan sosial saat ini diantaranya;

- a. Bansos Non luran: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar, Bansos BPNT/RASTRA, ASPBD, ASLIT, BSM BLT.
- b. Jaminan Sosial/luran: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JKK, JKN, JP), Asuransi Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PT Taspen), TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan (PT. Asabri).

Program pengentasan kemiskinan pemerintah dibagi menjadi tiga kategori. yaitu:

- a. Klaster I adalah pengentasan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar, mengurangi beban hidup, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Mekanisme pelaksanaan kegiatannya bersifat langsung, dan masyarakat dapat langsung merasakan manfaatnya. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin (RASKIN), dan Bantuan Siswa Miskin adalah contoh program (BSM).
- c. Klaster II adalah inisiatif pengentasan masyarakat miskin dengan pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pendekatan ini harapannya

dapat mendorong masyarakat miskin untuk ikut serta pada skala yang lebih luas, khususnya proses pembangunan daerah.

- d. Klaster III, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dengan tujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Diharapannya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Kredit Usaha Rakyat adalah contoh program jenis ini (KUR).

II.4 Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

II.4.1 Pengeritan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial Indonesia yang memberikan bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria tertentu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, dengan tujuan khusus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

II.4.2 Dasar Hukum

Perlu adanya landasan hukum yang melandasi dalam merancang Program Keluarga Harapan agar tujuan program yang dibentuk jelas tujuan dan landasan hukum yang melandasinya:

1. PP RI Nomor 82 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
2. Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016. Tentang Belanja Bantuan Sosial Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
5. UU Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 2009.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Fakir Miskin.
7. UU Penyandang Disabilitas, UU No 8 Tahun 2016.

II.4.3 Tujuan Program Keluarga Harapan

Berikut tujuan dari Program Keluarga Harapan:

1. Mengubah perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
4. Menghilangkan ketimpangan dan kemiskinan.
5. Menjelaskan kepada KPM keunggulan produk dan layanan keuangan formal.

II.4.4 Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima manfaat PKH dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan komponen kelompok tersebut, yang meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Rincian berikut adalah di antara kriteria untuk setiap komponen:

1. Komponen Kesehatan

Berikut persyaratan kelayakan penerima komponen kesehatan PKH:

- a. Wanita yang sedang hamil, pasca melahirkan, atau menyusui

Wanita hamil/nifas/menyusui adalah wanita yang sedang

mengharapkan kehidupan baru, pernah mengalami kehamilan dalam jumlah terbatas, dan/atau sedang menyusui.

b. Masa bayi dan masa kanak-kanak

Anak usia dini mengacu pada seorang anak muda yang tidak bersekolah dan berusia antara 0 dan 6 tahun (ditentukan oleh ulang tahun terakhir anak tersebut).

2. Aspek pendidikan

Anak usia sekolah merupakan kriteria kelayakan penerima manfaat PKH pada komponen pendidikan. Anak usia sekolah, berumur antara enam sampai dua puluh satu tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajibnya dan terdaftar di SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/MA, atau program yang sederajat.

3. Komponen kesejahteraan social

Berikut kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial:

a. Orang tua

Orangtua yang telah lanjut usia, terdaftar di kartu keluarga yang sama sebagai anggota keluarga.

b. Individu dengan disabilitas berat

Penyandang Disabilitas Berat adalah individu penyandang disabilitas yang tidak mampu lagi melakukan aktivitas sehari-hari dan/atau bergantung pada orang lain sepanjang hidupnya dan tercatat dalam satu kartu keluarga dan berada dalam satu keluarga.

II.4.5 Besaran Manfaat dan Jangka Waktu Kepesertaan PKH

Program Keluarga Harapan menawarkan dua jenis bantuan sosial: bantuan tetap dan bantuan komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendampingan yang konsisten untuk setiap keluarga
 - a. Rp. 550.000,- per keluarga per tahun.
 - b. AKSES PKH : Rp. 1.000.000,- per keluarga per tahun.
2. Bantuan komponen untuk seluruh anggota keluarga PKH
 - a. Ibu Hamil : Rp. 3.000.000 per tahun
 - b. PAUD : Rp. 3.000.000 per tahun
 - c. SD : Rp. 900.000 per tahun
 - d. SMP : Rp. 1.500.000 per tahun
 - e. SMA : Rp. 2.000.000 per tahun
 - f. Cacat berat : Rp. 2.400.000 per tahun
 - g. Lanjut Usia : Rp. 2.400.000 per tahun

Kepesertaan PKH tidak bersifat permanen, meskipun Program Keluarga Harapan merupakan kegiatan yang memakan waktu lama. Keikutsertaan penerima PKH sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan; jika tidak ada lagi persyaratan yang dapat dipenuhi, masyarakat tidak dapat lagi menerima bantuan dan dikeluarkan dari penerima PKH. Sertifikasi ulang akan dilakukan pada tahun kelima kepesertaan PKH. Sertifikasi ulang adalah kegiatan pendataan yang dilakukan pada tahun kelima anggota rumah tangga dan menggunakan metode tertentu.

II.4.6 Hak keluarga Penerima Manfaat PKH

Keluarga penerima PKH berhak mendapatkan manfaat sebagai berikut:

- a. bantuan sosial PKH;

- b. bantuan sosial PKH;
- c. Pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; selain itu;
- d. Skema dukungan pelengkap di bidang perumahan, energi, ekonomi, subsidi, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan penting lainnya.

II.5 Konsep kesejahteraan Masyarakat

II.5.1 Konsep kesejahteraan Masyarakat

Manusia yang berkembang sempurna dan terintegrasi secara spiritual dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal. Kata "kemakmuran" menunjukkan keadaan di mana setiap orang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya berkat aksesibilitas barang dan jasa dengan harga yang wajar. Kesejahteraan jasmani dan rohani adalah dua arti dari kata "kesejahteraan". Dengan menyediakan kebutuhan keuangan seseorang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan perumahan, seseorang dapat mencapai kesejahteraan fisik. Ketenangan, ketenangan, dan kedamaian batin adalah karakteristik dari kesejahteraan spiritual.

Keadaan kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan bagaimana kehidupan masyarakat yang diindikasikan oleh taraf hidupnya. Terpenuhinya kebutuhan material dan sosial merupakan kondisi yang menandakan masyarakat sejahtera. Dalam beberapa kasus, kesejahteraan dikaitkan dengan konteks kemiskinan. Kemiskinan menurun ketika tingkat kesejahteraan sosial meningkat. Semakin besar angka kemiskinan, semakin besar pula jumlah pengangguran.

Kesejahteraan masyarakat, menurut Todaro dan Smith (2013), adalah "ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik", yang terdiri dari:

1. Tingkat Kebutuhan Dasar Meningkatkan kapasitas dan menyalurkan

kebutuhan tersebut makanan, perumahan, kesehatan, juga lingkungan secara adil.

2. Pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak, tingkat pendapatan yang lebih tinggi, dan standar hidup yang lebih tinggi.
3. Pengembangan skala ekonomi dan perluasan pilihan sosial bagi masyarakat dan negara. Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, ada pilihan pekerjaan yang lebih besar dari masyarakat yang lebih baik..

II.5.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu pendekatan perhitungan kesejahteraan yang digunakan di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seseorang (basic need method). Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar seseorang akan makanan dan bukan makanan disebut sebagai kemiskinan. Berikut beberapa ilustrasi indikator kesejahteraan, seperti:

1. Indikator Kesejahteraan Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan atau kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

- b. Sebuah bangunan tempat tinggal memiliki luas lantai kurang dari 8 m².
- c. Lantai bangunan tempat tinggal jenis ini terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murah.
- d. Dinding rumah mereka terbuat dari bambu, jerami, atau dinding berkualitas buruk atau tidak diplester.
- e. Tidak memiliki tempat buang air besar sendiri dan malah berbagi satu dengan rumah tangga lain.
- f. Tidak ada listrik yang digunakan dalam penerangan rumah tangga.

- g. Air minum diperoleh dari sumur atau mata air yang tidak terlindung, seperti sungai atau hujan.
 - h. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
 - i. Batasi diri Anda pada satu porsi daging, susu, atau ayam per minggu.
 - j. Beli hanya satu set pakaian baru per tahun.
 - k. Hanya bisa makan satu atau dua kali sehari.
 - l. Tidak mampu membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau Poliklinik.
 - m. Kepala rumah tangga berpenghasilan kurang dari Rp600.000 per bulan sebagai petani dengan luas tanah 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain.
 - n. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya tamat SD.
 - o. Tidak memiliki tabungan atau barang senilai Rp. 500.000 yang mudah dijual, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang berharga lainnya.
2. Indikator kesejahteraan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Tabel II.I
Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera menurut BKKBN

1	Belum dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KS I.	KELUARGA PRA SEJAHTERA	
2	Makan 2kali sehari atau lebih.	KS I	Kebutuhan Dasar
3	Memiliki pakaian yang berbeda.		
4	Rumah memiliki atap,lantai dan dinding yang baik.		
5	PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi.		
6	Semua anak usia 7-15 tahun dalam keadaan bersekolah.		

7	Melaksanakan ibadah agama sesuai kepercayaan masing-masing.	KS II	Kebutuhan Psikologi
8	Paling kurang sekali seminggu makan daging/ikan/telur.		
9	Mendapatkan paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.		
10	Luas lantai rumah paling kurang 8m ² setiap penghuni rumah.		
11	Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat.		
12	Anggota keluarga yang bekerja atau memperoleh penghasilan.		
13	Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin.		
14	PUS dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.		
15	Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.	KS III	Kebutuhan Pengembangan
16	Sebagian penghasilan ditabung (uang maupun barang)		
17	Makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi.		
18	Mengikuti kegiatan masyarakat.		
19	Mendapat akses informasi dan surat kabar, radio, TV dan majalah.		
20	Memberikan sumbangan materiil secara teratur.	KS III PLUS	Kebutuhan Aktualisasi Diri
21	Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.		

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2022

BKKBN menjalankan program Pendataan Keluarga untuk menghitung tingkat kesejahteraan.

1. Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin) adalah keluarga yang belum memenuhi salah satu indikator Keluarga Sejahtera tahap I.

2. Keluarga Sejahtera I (miskin) adalah keluarga baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Secara umum, anggota keluarga makan dua kali atau lebih dalam sehari;
 - b. Anggota keluarga berpakaian berbeda untuk rumah, kantor/sekolah, dan bepergian;
 - c. Rumah tempat tinggal keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik;
 - d. Jika pasangan usia subur ingin ber-KB, pergi ke fasilitas pelayanan kontrasepsi;
 - e. Semua anak usia 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
3. Keluarga Sejahtera Tahap II didefinisikan sebagai keluarga yang telah memenuhi indikator Keluarga Sejahtera Tahap I (indikator 1–6) serta indikator sebagai berikut:
 - a. Pada umumnya anggota keluarga beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b. Semua anggota keluarga makan daging/ikan/telur minimal seminggu sekali;
 - c. Semua anggota keluarga menerima setidaknya satu pasang pakaian baru per tahun;
 - d. Luas lantai rumah minimal 8 m² untuk setiap penghuni rumah;
 - e. Keluarga dalam keadaan sehat selama tiga bulan terakhir, sehingga dapat menjalankan tugas/fungsinya masing-masing;
 - f. Satu atau lebih anggota keluarga bekerja untuk mencari nafkah;
 - g. Semua anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun dapat membaca

aksara latin;

- h. Kontrasepsi digunakan oleh pasangan usia subur dengan anak berusia dua tahun atau lebih.
4. Keluarga Sejahtera Tahap III adalah keluarga yang telah memenuhi indikator Keluarga Sejahtera Tahap I dan Keluarga Sejahtera II (indikator 1 sampai dengan 14) serta indikator sebagai berikut:
 - a. Keluarga ingin memperluas pengetahuannya;
 - b. Sebagian dari pendapatan keluarga disimpan sebagai uang atau barang;
 - c. Kebiasaan keluarga makan bersama minimal seminggu sekali digunakan untuk berkomunikasi;
 - d. Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan komunitas lingkungan;
 - e. Koran/majalah/radio/tv memberikan informasi kepada keluarga.
 5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus memenuhi indikator Keluarga Sejahtera Tahap I, Indikator Keluarga Sejahtera II, dan Indikator Keluarga Sejahtera III (Indikator 1–19) serta indikator sebagai berikut:
 - a. Keluarga memberikan kontribusi materi untuk kegiatan sosial secara teratur;
 - b. keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/lembaga kemasyarakatan.

II.6 Kerangka Pikir

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Efektivitas Pelaksanaan Program, salah satu penunjang agar program terlaksana sesuai dengan tujuannya, menjadi kerangka penelitian ini. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial menyatakan bahwa program yang terencana, terarah, dan diperlukan program

perlindungan sosial yang berkelanjutan. Sehubungan dengan isu-isu ini dan dukungan tinjauan literatur, peneliti mengembangkan kerangka kerja yang konsisten dengan gagasan Sutrisno (2007:125-126).

Hal itu dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Lima indikator yang dikemukakan oleh teori Sutrisno (2007:125-126) untuk mengukur keberhasilan suatu program: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Akan tetapi, peneliti hanya menggunakan tiga indikator dalam mengukur efektivitas program dikarenakan hanya sampai pada mengukur efektivitas proses pelaksanaan program PKH di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sehingga peneliti hanya menggunakan tiga indikator yakni: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, dan Tepat Waktu.

Gambar II.1
Kerangka Pikir

